

Perkembangan Bank Sentral : Status, Kedudukan, dan Tugas dari Bank Sentral

Rini Puji Astuti¹, Lisa Maretha Wulandari², Desi Duwi Safitri³
^{1,2,3} UIN Kiai Haji Achmad Siddiq

Jl. Mataram No.1, Krajan, Sempusari, Kec. Kaliwates, Kabupaten Jember, Jawa Timur.

Email : rinipuji.astuti111983@gmail.com lisamaretha002@gmail.com
sftrhdesi12@gmail.com

Abstract. *The role and function of Bank Indonesia as the central bank is crucial to revitalize the goal of maintaining and preserving the value of the rupiah, which is an important part of sustainable economic growth that will improve people's welfare. This goal is part of the economic recovery and reform policy that will help Indonesia get out of the middle economic crisis. The purpose of this study is to determine the development of the status, position, and duties of the central bank. This research uses the literature method. In 1968, Bank Indonesia's functions and responsibilities as the central bank began to diminish. In 1999, it was again responsible for safeguarding and maintaining the value of the rupiah. Its central bank work consists of three main pillars: setting and implementing monetary policy, maintaining a smooth payment system, and maintaining the stability of the national financial system. To improve people's quality of life, Bank Indonesia is also responsible for acting as a development agent.*

Keywords: *Development of Status, Position, Duties, Central Bank.*

Abstrak. Peran dan fungsi Bank Indonesia sebagai bank sentral sangat penting untuk merevitalisasi tujuan menjaga dan mempertahankan nilai rupiah, yang merupakan bagian penting dari pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan yang akan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Tujuan ini merupakan bagian dari kebijakan pemulihan dan reformasi perekonomian yang akan membantu Indonesia keluar dari krisis ekonomi tengah. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui perkembangan status, kedudukan, dan tugas dari bank sentral. Penelitian ini menggunakan metode literatur. Pada tahun 1968, fungsi dan tanggung jawab Bank Indonesia sebagai bank sentral mulai berkurang. Pada tahun 1999, ia kembali bertanggung jawab untuk menjaga dan mempertahankan nilai rupiah. Pekerjaan bank sentralnya terdiri dari tiga pilar utama: menetapkan dan menjalankan kebijakan moneter, menjaga kelancaran sistem pembayaran, dan menjaga stabilitas sistem keuangan nasional. Untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, Bank Indonesia juga bertanggung jawab untuk bertindak sebagai agen pembangunan.

Kata kunci: Perkembangan Status, Kedudukan, Tugas, Bank Sentral.

LATAR BELAKANG

Sekitar awal abad ke-17, bank sentral muncul. Ini terbukti dengan pendirian Swedish Riskbank pada tahun 1668, sebuah bank swasta yang ditugaskan untuk memberi pinjaman kepada pemerintah dan menjadi lembaga pemerintah yaitu kliring transaksi finansial. Pada tahun 1694, bank tambahan didirikan di Inggris dengan nama Bank of England. Ini bertindak sebagai pemberi utang pemerintah, pemberi pinjaman rediskonto kepada bank atas commercial paper perusahaan, dan pemberi pinjaman likuiditas jangka pendek kepada bank (Lender of The Last Resort). Kemudian muncul bank lain, seperti Activate Windo, yang mendirikan beberapa bank di Eropa untuk pembiayaan perang.

Sampai saat ini, tidak ada definisi bank sentral yang disepakati. Beberapa orang berpendapat bahwa peran bank sentral menentukan definisinya. Misalnya, Hawke (1973)

Received April 30, 2024; Accepted Mei 30, 2024; Published Juni 30, 2024

* Rini Puji Astuti, rinipuji.astuti111983@gmail.com

mengatakan bahwa bank sentral adalah sebuah organisasi yang berada di antara perbankan dan pemerintah. Sedangkan Goodhart (1991) menjelaskan peran dan fungsi bank sentral. Bank sentral berasal dari bank swasta yang dulunya dimiliki oleh pemerintah sebelum berkembang menjadi entitas independen. Mereka bertanggung jawab atas stabilitas ekonomi, terutama karena bank swasta tidak dapat bertahan dalam kondisi yang tidak stabil.

Bank Sentral Republik Indonesia sebelumnya dikenal sebagai De Javasche Bank. Ini adalah lembaga kelembagaan yang memiliki fungsi khusus dalam bidang moneter, sistem pembayaran, dan mungkin juga perbankan nasional. Menurut Pasal 4 Ayat (1) UU Bank Indonesia, "secara umum dinyatakan bahwa bank ialah suatu lembaga keuangan yang merupakan lembaga bisnis utama dalam sumber perekonomian suatu negara, sehingga adanya sebuah lembaga bank akan menimbulkan berbagai masalah." keikutsertaan pemerintah dalam pengawasan ketat perkembangan maupun perubahan dalam ranah perbankan. Bank akan dianggap sebagai salah satu faktor yang mendorong perekonomian nasional.

Sebagai bank sentral, fungsi (BI) adalah untuk mencapai dan menjaga kestabilan nilai rupiah, yang terdiri dari dua aspek, yaitu kestabilan nilai dan kestabilan mata uang, baik terhadap barang dan jasa maupun mata uang negara lain. Untuk mencapai tujuan tersebut, Bank Indonesia menggunakan tiga pilar, atau bidang tugas, ketiga pilar tersebut adalah, untuk mengatur dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, dan mengatur dan mengawasi perbankan di Indonesia. Untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah, ketiga komponen ini harus diintegrasikan. Selain itu, bank Indonesia hanya memiliki otoritas untuk mengedarkan uang di Indonesia.

Untuk menjaga dan mempertahankan kestabilan nilai rupiah, yang merupakan bagian penting dari pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan yang akan meningkatkan kesejahteraan rakyat, peran dan fungsi Bank Indonesia sebagai bank sentral sangat penting untuk merevitalisasi tujuan tersebut sebagai bagian dari kebijakan pemulihan dan reformasi perekonomian yang akan membantu Indonesia keluar dari krisis ekonomi tengah.

KAJIAN TEORITIS

Jurnal yang ditulis oleh Tria Sughesti Adifa dkk, dengan judul Perkembangan Bank Sentral oleh Universitas Islam Negeri Kiai Hj Achmad Siddiq jember adalah jurnal yang meneliti tentang Bank Indonesia telah mengalami perkembangan yang begitu pesat dengan status dan kedudukan yang berbeda, namun adanya perubahan dalam konsep kelembagaan bank sentral dan tujuan serta tugasnya. Tugas dan fungsi dari Bank Indonesia sebagai bank sentral telah mulai menurun akibat kejadian pada tahun 1968. Bank Indonesia telah memiliki kedudukan dalam lembaga negara yang independen dalam melaksanakan tugas wewenangnya, bebas dari campur tangan pemerintah dan/atau pihak lain, kecuali untuk hal-hal yang secara tegas diatur dalam undang-undang. Namun, Bank Indonesia tidak dikenal sebagai lembaga negara, melainkan sebagai lembaga pemerintah (*regering organen / executive body*). Penelitian ini menggunakan metode kualitatif jenis studi kasus untuk memahami perkembangan Bank Indonesia dalam konteks transisi menuju kebijakan moneter berbasis inflasi.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan yaitu metode penelitian literatur, metode literatur adalah suatu pendekatan penelitian yang berfokus pada pengumpulan, analisis, intrpretasi informasi yang berasal saro berbagai sumber literatur yang relavan dengan topik penelitian. Metode literatur, juga dikenal sebagai tinjauan pustaka, yang melibatkan pengumpulan data dari sumber tulisan yang sudah ada dalam bentuk tulisan, artikel, buku, jurnal, dan sumber literatur lainnya untuk mendukung atau menguatkan argumen penelitian. Tujuan peneliti menggunakan metode penelitian ini untuk mendapatkan landasan teori yang dapat membantu memecahkan masalah yang sedang diteliti. Penemuan teori ini merupakan langkah awal agar penulis dapat memahami masalah dengan lebih baik sesuai dengan kerangka berpikir ilmiah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bank Indonesia telah mengalami berbagai status dan kedudukan sebagai bank sentral, terutama karena konsep kelembagaan, tujuan, dan tugasnya berubah. Pada umumnya, bank sentral adalah lembaga yang bertanggung jawab atas sistem pembayaran, moneter, dan bahkan perbankan suatu negara. Bank Indonesia sebagai bank sentral didirikan pada tahun 1951 untuk memberikan kedaulatan ekonomi Republik Indonesia.

Pada tahun 1968, fungsi dan tanggung jawab Bank Indonesia sebagai bank sentral mulai berkurang. Pada tahun 1999, ia kembali bertanggung jawab untuk menjaga dan mempertahankan nilai rupiah. Pekerjaan bank sentralnya terdiri dari tiga pilar utama: menetapkan dan menjalankan kebijakan moneter, menjaga kelancaran sistem pembayaran, dan menjaga stabilitas sistem keuangan nasional. Untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, Bank Indonesia juga bertanggung jawab untuk bertindak sebagai agen pembangunan.

Bank Indonesia beroperasi sebagai lembaga negara yang independen dan tidak terpengaruh oleh pemerintah atau pihak lain, kecuali dalam hal-hal yang diatur oleh undang-undang. Namun, bank ini dianggap sebagai lembaga pemerintah (organ pemerintah atau badan eksekutif).

Perkembangan Status, Kedudukan dan Tugas dari Bank Sentral

1. Perkembangan Status Bank Sentral

Peran bank sentral berubah seiring perkembangan ekonomi, politik, dan tuntutan masyarakat. Sebagai contoh, bank komersial diberi mandat oleh pemerintah, yang berarti mereka adalah bankir pemerintah, kemudian berubah menjadi bank sentral. Selain itu, ada bank sentral yang diberi mandat oleh pemerintah, seperti yang terlihat di Skandinavia dan Belanda. Beberapa bank sentral lain didirikan untuk tujuan khusus, seperti membiayai perang (Bank of England) atau menstabilkan ekonomi setelah perang.

Selain itu, peran dan fungsi bank sentral berkembang seiring perkembangan ekonomi, sosial politik, dan teori dan pengetahuan. Masalah kurs dan kestabilan nilai mata uang muncul sebagai akibat dari peningkatan perdagangan internasional dan upaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Akibatnya, tugas utama bank sentral saat ini adalah menjaga kestabilan nilai mata uang. Kestabilan nilai mata uang dari sisi internal ditentukan oleh kestabilan harga atau inflasi, sedangkan kestabilan nilai mata uang dari sisi eksternal ditentukan oleh kestabilan kurs mata uang yang dikeluarkan dibandingkan dengan mata uang lain.

Tujuan utama bank sentral juga akan berubah sesuai dengan waktunya. Negara-negara mengadopsi standar emas klasik untuk memastikan bahwa logam mulia yang digunakan sebagai standar dapat dipertahankan. Kebijakan bank sentral bertujuan untuk menjaga harga stabil saat mazhab beralih dari emas ke fiat money. Dalam kebijakan moneter, bank sentral biasanya memiliki sasaran intermediate selain sasaran akhir kestabilan harga.

Pada akhir 1800-an dan awal 1900-an, peran bank sentral juga berkembang. Gagasan bahwa kestabilan moneter adalah salah satu hal yang diperlukan untuk kestabilan finansial telah muncul baru-baru ini. Sebaliknya, kestabilan finansial sangat penting untuk menjaga kestabilan harga. Salah satu pertimbangan utama adalah bahwa kestabilan sistem keuangan, khususnya sistem perbankan, akan mendorong transmisi dan efektivitas kebijakan moneter. Oleh karena itu, gangguan terhadap kestabilan sistem keuangan, khususnya sistem perbankan, dapat mengganggu mekanisme transmisi kebijakan moneter.

Bank sentral memiliki hubungan yang kuat dengan lembaga keuangan, terutama perbankan, sehingga peran mereka dalam menjaga stabilitas sistem keuangan telah meningkat. Saat didirikan, bank sentral adalah salah satu bank komersial, dan ketika mereka diberi wewenang untuk menerbitkan uang kertas dan logam, pola hubungan yang ada sebelumnya berubah menjadi hubungan antara bank komersial dengan bank sentral. Ini adalah bagian penting dari perkembangan peran bank sentral dalam menjaga stabilitas sistem keuangan.

2. Perkembangan Kedudukan Kelembagaan Bank Sentral

Selain itu, lembaga bank sentral mengalami evolusi seiring dengan perkembangan ekonomi dan sosial politik suatu negara. Secara umum, bentuk dan ukuran lembaga bank sentral saat ini adalah hasil penyesuaian lembaga terhadap perkembangan yang terjadi di sekitarnya, terutama dalam hal perkembangan politik, ekonomi, sosial budaya, dan ilmu ekonomi.

Bank-bank yang didirikan dan kemudian menjadi bank sentral biasanya adalah bank komersial sebelum diberi hak khusus oleh pemerintah untuk bertindak sebagai bank pemerintah dan menerbitkan dan mengedarkan uang. Pada titik ini, mereka kemudian berkembang menjadi bank sirkulasi.

Bank sirkulasi adalah lembaga yang ditunjuk oleh negara atau pemerintah untuk mengeluarkan dan mengedarkan uang sebagai alat pembayaran legal di negara tersebut. Bahkan bank yang didirikan untuk berfungsi sebagai bankir pemerintah juga ditunjuk untuk melakukan kegiatan bank komersial.

Lembaga tersebut tetap berfungsi sebagai bank komersial dengan menerima dana dari masyarakat dan memberikan pinjaman kepada pihak yang membutuhkan dana. Organisasi ini masih melakukan tugas-tugas yang terbatas pada sistem pembayaran, seperti mengirim uang dan memberikan layanan perbankan. Selain itu, peran kebijakan

moneter tidak terlalu penting karena masalah moneter tidak terlalu kompleks. Mengambil peran sebagai penyedia pinjaman akhir bagi bank yang mengalami kesulitan likuiditas adalah tugas yang sangat penting.

Karena perkembangan ini, kapan sebuah bank komersial benar-benar berubah menjadi bank sentral? Menurut Capie et al. (1994), suatu bank dapat dianggap sebagai bank sentral jika memenuhi setidaknya tiga persyaratan: itu dimiliki oleh pemerintah, memiliki wewenang eksklusif untuk mengedarkan uang, dan berfungsi sebagai pembiayaan terakhir. Pada akhirnya, bank sentral juga berfungsi sebagai pengawasan dan regulator bank sentral, dan di beberapa negara bahkan menjaga stabilitas sistem keuangan. Selain itu, perselisihan dalam sistem keuangan melanda lembaga keuangan non-bank, seperti lembaga asuransi, pasar modal, dan lembaga keuangan lainnya.

3. Perkembangan Tugas Bank Sentral

Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, posisi bank sentral dalam perekonomian sebuah negara telah berkembang dan berkembang seiring dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepada bank sentral. Sebagaimana diketahui, bank sentral adalah yang pertama mengeluarkan uang. Satu-satunya lembaga di negara tersebut yang dapat mencetak dan mengedarkan uang secara legal adalah bank sentral. Mengatur dan memelihara sistem pembayaran adalah nama pekerjaan ini.

Karena perdagangan antar negara semakin berkembang, bank sentral kemudian diberi tugas untuk menjaga kestabilan nilai uang yang diedarkan. Selanjutnya, pekerjaan ini disebut sebagai pekerjaan di bidang keuangan. Bank sentral ditugaskan untuk mengawasi dan mengawasi bank komersial selain menjalankan peran sebagai lender of the last resort. Bank sentral memberikan bantuan likuiditas terakhir kepada bank atau lembaga keuangan yang mengalami masalah dana.

Pada tahap berikutnya, bank sentral mulai secara bertahap meninggalkan peran bank komersial. Ini dilakukan sebagai bagian dari tanggung jawabnya untuk menjaga stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan dan untuk menghindari kepentingan yang bertentangan antara sesama bank komersial.

Untuk berfungsi sebagai pemberi pinjaman terakhir, bank sentral membutuhkan informasi lengkap tentang kondisi bank yang akan diberikan pinjaman. Akibatnya, bank sentral harus memiliki hubungan yang lebih dekat dengan bank individu. Pada akhirnya, bank sentral bertanggung jawab atas pengawasan dan pengaturan bank. Namun, beberapa bank sentral di negara-negara Amerika Latin seperti Chile, Meksiko, dan Peru, serta di

Skandinavia, Finlandia, Denmark, Swedia, dan Norwegia, tidak memiliki tanggung jawab untuk mengatur dan mengawasi bank. Selain itu, bank sentral didirikan dengan tujuan mendorong pertumbuhan ekonomi, menciptakan lebih banyak kesempatan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan umum.

Sebenarnya, bank sentral bertujuan untuk mencapai tujuan tertentu melalui berbagai tugas yang disebutkan di atas. Chandavarkar (1996) menyatakan bahwa tujuan umum kebijakan bank sentral adalah untuk menjaga kestabilan harga, nilai tukar, neraca pembayaran yang konsisten, pertumbuhan ekonomi, pekerjaan penuh, dan kesejahteraan umum. Pendapat-pendapat tersebut menunjukkan bahwa bank sentral telah berkembang untuk berbagai alasan. Banyak bank sentral mengubah tujuan mereka dari berbagai tujuan, seperti meningkatkan kapasitas output perekonomian, meningkatkan kesempatan kerja, dan menjaga kestabilan nilai mata uang negara, menjadi satu, mencapai dan mempertahankan kestabilan harga.

Perkembangan Bank Sentral dan Hubungannya dengan Lembaga Keuangan Internasional

1. Perkembangan Bank Sentral

Pengertian modern dari bank sentral pertama kali muncul di negara-negara industri maju, terutama di Amerika Utara dan Eropa. Sebelum mencapai bentuknya saat ini, bank sentral telah mengalami banyak transformasi. Bank-bank di banyak negara secara bertahap berkembang menjadi lembaga keuangan utama dan menjadi bank sentral resmi. Ini disebabkan oleh fakta bahwa mereka ditugaskan untuk menerbitkan uang kertas dan berperan sebagai bankir dan agen pemerintah. Pada mulanya, bank tersebut disebut sebagai "bank nasional" atau "bank sirkulasi", bukan "bank sentral".

Bank sirkulasi kemudian mengambil alih operasi lain dan diberi tugas atau kekuasaan tertentu, menjadikannya "bank sentral" dalam arti yang lebih sederhana. Riksbank Swedia adalah bank tertua yang berkembang menjadi bank sirkulasi jika dilihat dari tahun kelahirannya. Namun, bank sirkulasi pertama yang berubah menjadi bank sentral adalah *Bank of England*, yang sekarang dikenal sebagai "seni perbankan sentralan".

Sistem *Reserve Federal*, yang didirikan pada tahun 1913, mengelola Bank Sentral Amerika Serikat. Tugas utama bank sentral adalah membuat uang. Banyak instrumen dalam sistem ini dapat memengaruhi jumlah uang dalam perekonomian dan suku bunga secara tidak langsung dan signifikan. Sebaliknya, sebagai bank sentral di

Jerman, *Deutsche Bundesbank* mengharuskan bank komersial di negara itu untuk menyimpan sebagian dari kewajiban mark Jerman sebagai deposito-tidak berbunga dalam rekening giro atau rekening jangka pendek.

Setelah Konferensi Meja Bundar (KMB) tahun 1949 di Den Haag, lahir bank sentral di Indonesia. KMB membuat keputusan penting untuk menunjuk *De Javasche Bank NV* sebagai bank sentral. Bank komersial ini berdiri sejak 1828 dan pada masa kolonial pemerintah Belanda memberinya tugas sebagai bank sirkulasi (*bank of issueing money*) di Hindia Belanda.

Namun, Bank Negara Indonesia (BNI) 1946 didirikan oleh pemerintah Indonesia pada tahun 1946, berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 1946. Pada awalnya, BNI berfungsi sebagai bank sentral dan memegang kas negara. BNI juga dapat mengeluarkan dan mengedarkan uang kertas bank. Selanjutnya, KMB memutuskan untuk berubah menjadi bank pambanunan. Meskipun *De Javasche Bank* telah disetujui dan ditetapkan sebagai bank sentral oleh pemerintah Indonesia dan Belanda, kepentingan kolonial terus memengaruhi kebijakan. Karena bank sentral suatu negara masih berada di bawah pengaruh kepentingan lain, posisi *De Javasche Bank* menjadi dilematis.

Oleh karena itu, pemerintah menasionalisasi *De Javasche Bank* dengan Keputusan Pemerintah Nomor 118 pada 12 Juli 1951. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1951 memperkuat nasionalisasi. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1953 tentang Pokok-pokok Bank Sentral juga memperkuat nasionalisasi sebagai pengganti Undang-undang *De Javusche Bank*. Ini adalah tanda kemandirian nasional dalam hal moneter dan ekonomi.

Peraturan seperti Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1955 dan Keputusan Dewan Moneter Nomor 25, 26, dan 27 Tahun 1957 menunjukkan peran Bank Indonesia sebagai bank sentral negara yang merdeka. Bank Indonesia diwajibkan oleh undang-undang untuk menjaga stabilitas sistem keuangan, mengedarkan uang, mengembangkan sistem perbankan, melakukan pengawasan kegiatan perbankan, dan memberikan kredit. Bank sentral juga tetap beroperasi sebagai bank komersial, seperti *De Javasche Bank*.

Sangat penting bagi bank sentral untuk memainkan peran langsung dalam menciptakan kemakmuran, terutama di negara-negara sedang berkembang. Akibatnya, mereka tidak boleh mengabaikan berbagai aspek pembangunan ekonomi, seperti

peningkatan output dan kesempatan kerja, penerimaan devisa dan keseimbangan eksternal, dan distribusi pendapatan dan kekayaan masyarakat.

Sebaliknya, tujuan didirikannya bank sentral adalah untuk secara khusus menangani masalah utama yang berkaitan dengan pembangunan ekonomi: stabilitas harga (*price stability*) dan stabilitas nilai tukar mata uang (*exchange rate stability*). Dengan stabilitas moneter ini, bank sentral dapat menciptakan dasar untuk pertumbuhan ekonomi (*economic growth*), tabungan (*saving*), dan kesempatan kerja yang luas (*full employment*).

Di negara sedang berkembang yang belum berhasil menghasilkan sebagian besar pendapatannya dari pajak, orang menyalahgunakan sistem moneter untuk membiayai program sosial-ekonomi dan politik, yang dapat menyebabkan inflasi dan kehilangan nilai uang. Inflasi dapat menghancurkan semua rencana pertumbuhan dan pembangunan ekonomi, jadi bank sentral diperlukan untuk melindungi ekonomi dari inflasi. Lembaga ini harus memiliki otonomi untuk menjalankan fungsinya.

2. Hubungan Bank Sentral dengan Lembaga Keuangan Internasional

Bank Indonesia dapat menjalin hubungan dengan berbagai pihak, baik di dalam negeri maupun internasional, untuk melaksanakan tugasnya dalam bidang ekonomi, moneter, dan perbankan. Hubungan yang terjadi antara Bank Indonesia dan berbagai pihak internasional merupakan bagian dari komunitas otoritas keuangan global. Bank Indonesia telah bekerja sama dengan beberapa perusahaan berikut:

- a. Investasi bersama untuk menjaga kestabilan pasar valuta asing.
- b. Penyelesaian transaksi lintas negara.
- c. Hubungan koresponden.
- d. Berbagi informasi tentang tanggung jawab bank sentral, termasuk pengawasan bank.
- e. Pelatihan/penelitian di bidang moneter dan sistem pembayaran.

Selain itu, Bank Indonesia mewakili Bank Indonesia di sejumlah lembaga dan forum internasional, seperti:

- a. *The South East Asian Central Banks Research and Training Centre* (SEACEN Centre),
- b. *The South East Asian, New Zealand and Australia Forum of Banking Supervision* (SEANZA),
- c. *The Executive Meeting of East Asian and Pacific Central Banks* (EMEAP),
- d. *ASEAN Central Bank Forum* (ACBF), dan

e. *Bank for International Settlement (BIS)*.

Selain itu, Bank Indonesia bertindak atas nama pemerintah Indonesia di berbagai forum dan organisasi internasional, seperti:

- a. *Association of South East Asian Nations (ASEAN)*,
- b. *ASEAN+3 (ASEAN + China, Jepang, dan Korea)*,
- c. *Asia Pacific Economic Cooperation (APEC)*,
- d. *Manila Framework Group (MEG)*
- e. *Asia-Europe Meeting (ASEM)*,
- f. *Islamic Development Bank (IDB)*,
- g. *International Monetary Fund (IMF)*,
- h. *World Bank*, termasuk keanggotaan di *International Bank for Reconstruction and Development (IBRD)*, *International Development Association (IDA)*, *International Finance Cooperation (IFC)*, dan *Multilateral Investment Guarantee Agency (MIGA)*,
- i. *World Trade Organization (WTO)*,
- j. *Intergovernmental Group of 20 (G20)*,
- k. *Intergovernmental Group of 15 (G15 sebagai observer)*, dan
- l. *Intergovernmental Group of 24 (G24 sebagai observer)*.

KESIMPULAN DAN SARAN

Pada tahun 1668, Swedish Riskbank, sebuah bank swasta yang dimaksudkan untuk memberi pinjaman kepada pemerintah dan menjadi lembaga kliring untuk transaksi keuangan, menunjukkan kemunculan bank sentral. Pada tahun 1694, bank tambahan didirikan di Inggris dengan nama *Bank of England*. Ini bertindak sebagai pemberi utang pemerintah, pemberi pinjaman rediskonto kepada bank atas commercial paper perusahaan, dan pemberi pinjaman likuiditas jangka pendek kepada bank.

Menjaga stabilitas nilai mata uang adalah tujuan utama bank sentral saat ini. Ini dipengaruhi oleh stabilitas harga atau inflasi, sedangkan stabilitas nilai mata uang dari sisi eksternal ditentukan oleh stabilitas kurs mata uang yang dikeluarkan dibandingkan dengan mata uang lain.

Untuk melaksanakan fungsinya dalam bidang ekonomi, moneter, dan perbankan, Bank Indonesia dapat menjalin hubungan dengan berbagai pihak, baik di

dalam negeri maupun internasional. Hubungan yang terjadi antara Bank Indonesia dan berbagai pihak internasional merupakan bagian dari komunitas otoritas keuangan global.

Karena penelitian ini menggunakan metode penelitian literatur, maka keterbatasan dari penelitian ini yaitu keterbatasan data dan informasi. Penelitian literatur tergantung pada data dan informasi yang tersedia dalam sumber-sumber yang ada. Jika ada kekurangan dalam jumlah atau kualitas sumber, hal ini dapat membatasi pemahaman dan analisis. Penulis menyarankan untuk penelitian yang akan menggunakan metode literatur ini sebaiknya, menggunakan berbagai database akademisi dan sumber daya digital untuk menemukan informasi yang mungkin terlewatkan, dan juga dapat melihat tinjauan laporan penelitian, tesis, dan disertasi yang mungkin mengandung relavan, atau bahkan bisa membangun jaringan dengan peneliti lain di bidang yang sama agar dapat berbagi data dan informasi.

DAFTAR REFERENSI

- Achmad, F., Ahmad, N. H., Angellina, M. S., Attisha, A. S., Hatkasum, R. M., Nurjani, S., Rulyannas, T. I., & Sekararum, S. P. (2023). Peranan Bank Indonesia dalam mengatur dan mengawasi perbankan serta mengalihkan tugas ke Otoritas Jasa Keuangan. *Jurnal Jaman (Jurnal Akuntansi dan Manajemen Bisnis)*, 3(1), 57.
- Adhitya, W., Yulia, I., Ciplis, G. Q., & Nasir, M. A. (2019). *Perilaku kebijakan bank sentral di Indonesia*. Jember: CV. Pustaka Abadi.
- Andi, R. (2006). *Independensi Bank Indonesia sebagai bank sentral* (Tesis). Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.
- Ari, W. D. (2017). Bank sentral dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. *UBELAJ*, 1(1), 58-60.
- Bambang, S. (2018). Determinan profitabilitas bank umum terdaftar di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Bisnis dan Manajemen*, 8(1), 42.
- Fildzah, D. M., Rebecka, T. T. P., & Mei, S. A. T. (2024). Transmisi kebijakan moneter dan peran kebanksentralan dalam stabilitas ekonomi. *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*, 4(2).
- Jeslyn, P., Rudolf, S. M., & Grace, H. T. (2021). Kedudukan hukum Bank Indonesia sebagai bank sentral ditinjau dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009. *Lex Privatum*, 9(12), 184.
- Jimrid, D., Elko, L. M., & Royke, J. Y. K. (2021). Suatu tinjauan terhadap kelembagaan Bank Indonesia sebagai bank sentral berdasarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 2009. *Lex Privatum*, 9(6), 119.

- Miftakhul, H. (2022). Peran bank sentral dalam kebijakan moneter Islam. *SALIMIYA: Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam*, 3(1), 42-45.
- Nanda, C. A. P. (2016). Tugas Bank Indonesia sebagai bank sentral di Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 Juncto Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009. *Lex Administratum*, 9(4), 75-81.
- Solikin, M. J. (2021). *Pengantar kebanksentralan teori dan kebijakan*. Depok: Rajawali Pers.
- Suarpika, B., & Endang, R. B. (2021). *Kelembagaan bank sentral*. Surabaya: Anonymous Student.